

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Pernyataan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
Daftar Tabel dan Gambar	vii
Intisari	viii
Abstract	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II LANDASAN TEORI.....	8
A. Keuangan Negara.....	8
B. Penerimaan Negara Bukan Pajak.....	17
C. Kebijakan Publik.....	25
D. Aktor-aktor Dalam Kebijakan Publik.....	30
E. Efektivitas PNBP.....	33
F. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Implementasi Kebijakan PNBP.....	36
G. Variabel Penelitian.....	39
G.1. <i>Law Enforcement</i>	40
G.2. Komitmen Pengusaha Dan Pemerintah	43
H. Hubungan Antar Variabel.....	45
H.1. Hubungan Antara <i>Law Enforcement</i> Dengan Efektivitas PNBP...	45
H.2. Hubungan Antara Komitmen Pengusaha Dan Pemerintah Dengan Efektivitas PNBP.....	45
BAB III METODE PENELITIAN.....	47
A. Teknik Pengumpulan Data	47
B. Teknik Analisa Data	49
C. Definisi Konsepsional dan Operasional.....	50
C.1. Definisi Konsepsional.....	50
C.2. Definisi Operasional.....	51
BAB IV DESKRIPSI DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN	53
A. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan Departemen.....	53
B. Pembinaan Organisasi.....	55
C. Pembinaan Hukum dan Perundang-undangan.....	56
D. Pembinaan Kepegawaian.....	60

E. Pengembangan Sumberdaya Manusia.....	62
F. Pembinaan Sarana dan Prasarana Kerja.....	65
G. Keuangan.....	66
BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	68
A. Efektivitas Implementasi kebijakan penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).....	68
1. Kesesuaian antara target yang diinginkan dan realisasi yang dicapai.....	73
2. Perbandingan Potensi PNBP dengan Realisasi Yang Ada.....	77
B. Faktor-faktor Yang mempengaruhi Efektivitas Implementasi Kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).....	81
B.1. <i>Law Enforcement</i> (Sanksi Hukum).....	82
1. Tingkat penindakan pada level kontra prestasi dalam bentuk denda atau tilang.....	86
2. Tingkat penindakan pelanggaran pada level pengadilan dalam bentuk pembekuan aktivitas produksi.....	88
3. Frekuensi penindakan secara administratif yang dilakukan aparaturnya atau instansi yang berkompeten.....	90
B.2. Komitmen Pengusaha Dan Pemerintah	92
1. Tingkat pengetahuan dan ketaatan prosedur pembayaran pungutan.....	92
2. Pengadaan atau tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan kelautan yang dibangun pemerintah.....	94
C. Analisis Hubungan Antar Variabel.....	101
C.1. Pengaruh <i>Law Enforcement</i> Terhadap Efektivitas PNBP.....	101
C.2. Pengaruh Komitmen Pengusaha Dan Pemerintah Terhadap Efektivitas PNBP.....	102
BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	104
A. Kesimpulan.....	104
B. Rekomendasi.....	106
Daftar Pustaka.....	109
Lampiran	

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 1.1.	Target dan Realisasi PNBP Lingkup Departemen Kelautan dan Perikanan Tahun 2000-2003.....	4
Tabel 2.1.	Sumber-Sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak Dep. KP....	35
Tabel 3.1.	Informan dan Responden Penelitian.....	48
Tabel 4.1.	Jumlah PNS di Departemen Kelautan dan Perikanan s/d Tahun 2001.....	60
Tabel 4.2.	Jumlah Taruna/Siswa Baru TA 2002-2003 pada UPT Diklatkan dan Sekolah Binaan Daerah/Swasta.....	64
Tabel 4.3.	Alokasi Anggaran Keuangan Dep KP Tahun 2001-2003.....	67
Tabel 5.1.	Target & Realisasi PNBP Dep. KP 2001-2003.....	75
Tabel 5.2.	Prosentase Realisasi & Target PNBP.....	75
Tabel 5.3.	Sumber-sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak Departemen Kelautan dan Perikanan.....	78
Tabel 5.4.	Potensi PNBP Tahun 2003 Departemen Kelautan dan Perikanan.....	79
Tabel 5.5.	Prosentase Perbandingan Realisasi dan Potensi PNBP Tahun 2001-2003.....	80
Tabel 5.6.	Perhitungan Kerugian Negara Yang Dapat Diselamatkan.....	87
Tabel 5.7.	Pelanggaran Penangkapan Ikan Tahun 2003.....	89
Tabel 5.8.	Perkembangan Pembangunan/Rehabilitasi dan Detail Desain PP/PPI Tahun 2001-2003.....	99
Tabel 5.9.	Perubahan Status Pelabuhan Perikanan.....	100
Gambar 2.1	Tiga Aktor Yang Berperan Dalam Proses Penyusunan Kebijakan Publik.....	31
Gambar 2.2	Kerangka Analisis Kebijakan Efektivitas PNBP.....	34
Gambar 2.3.	Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan PNBP.....	40